

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 25 DAN 29 SEPTEMBER 2017



TENTANG
RAPERDA
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : SENIN

Tanggal : 25 September 2017

Waktu : 11.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :

- 1. Pembukaan;
- 2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
- 3. Skor (Penyusunan pemandangan umum fraksi)
- 4. Penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017
- 5. Skors (Penyusunan Jawaban Bupati)

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 38 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 7 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , atas anugerah yang diberikan kepada kita berupa kesempatan ini.

Anggaran 2017. Rapat paripurna ini terjadwalkan oleh Badan Musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang pada rapatnya tanggal 18 September 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum berlangsung ke acara pokok, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 kemarin umat Islam meninggalkan tahun 1438 H dan memasuki tahun 1439 H. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami segenap pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan Selamat Tahun Baru 1439 H, semoga tahun ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan semakin kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Aamiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa *“Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ”*.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

Dengan demikian, kuorum Rapat Paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 13.10 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Terdapat beberapa agenda pokok yang harus kita lalui dalam rapat paripurna ini, dan untuk lebih lengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Skors (penyusunan pemandangan umum fraksi);
4. Penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
5. Skors (penyusunan jawaban bupati);
6. Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara pokok pertama dalam rapat paripurna hari ini yaitu” Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD

**=== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 ===**

➤ *(Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita dengar penjelasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 oleh Saudara Bupati Rembang. Dari penjelasan tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017. Oleh karena penyusunan pemandangan umum fraksi memerlukan waktu, maka saya berikan waktu kepada fraksi-fraksi untuk menyusun pemandangan umumnya. Untuk itu rapat paripurna saya skors selama 60 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk menyusun pemandangan umum fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti agenda pokok yang kedua, yaitu Penyampaian

“ Sebelumnya ini saya tawarkan terlebih dahulu pada semua anggota DPRD yang hadir, apakah Pemandangan Umum Fraksi kali ini setiap Fraksi – Fraksi ada perwakilan satu persatu atau secara kolektif saja ???”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“ Kolektif saja “

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Ok kalau secara kolektif siapa yang ditunjuk sebagai perwakilan ?”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“ Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Ok silahkan kalau begitu

===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

➤ *(Penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terima kasih kepada Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara berikutnya yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Tahun Anggaran 2017. Namun sebelumnya, perlu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban atas pandangan fraksi ini.

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki agenda pokok ketiga yaitu Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

**=== JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI ===**

➤ *(Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaian jawabannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Agenda-agenda pokok dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Setelah rapat ini, selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dan TAPD dengan acara Penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, dilanjutkan dengan Rapat Badan Anggaran bersama Pimpinan Komisi dengan acara Strategi dan distribusi

Akhirnya, dengan mengucapkan "*Alhamdulillahil 'alamiin* " tepat pukul 15.50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

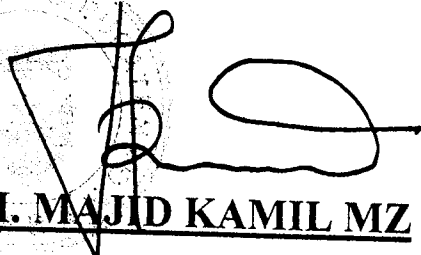
(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

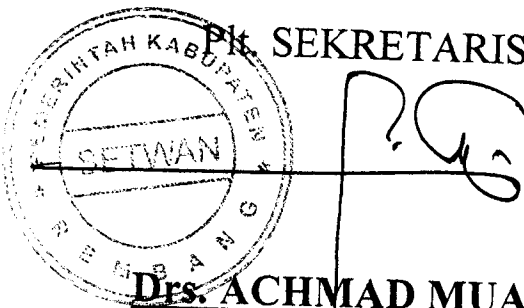
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,


H. MAJID KAMIL MZ

Plt. SEKRETARIS,


Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina/Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

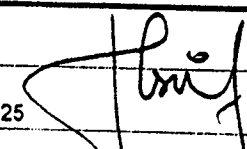
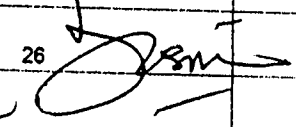
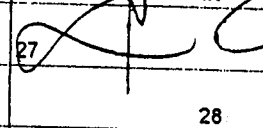
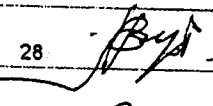
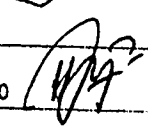
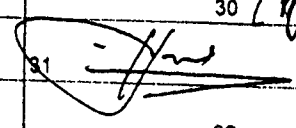
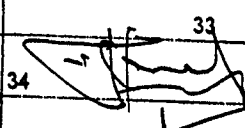
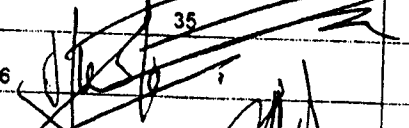
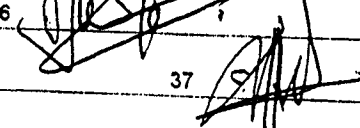
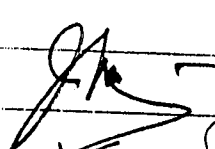
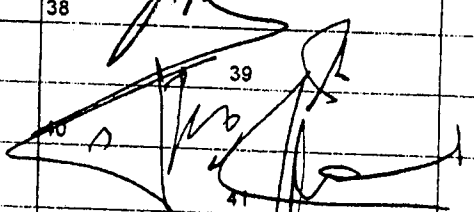
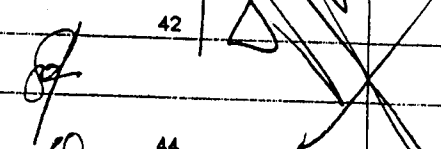
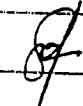
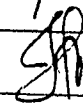
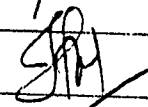
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017.
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMBAHASAN RAPRERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 25 SEPTEMBER 2017
PUKUL : 11.00 WIB

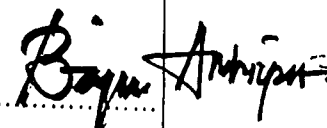
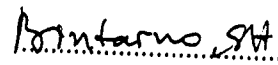
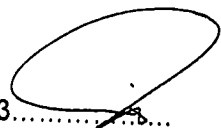
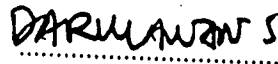
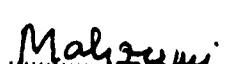
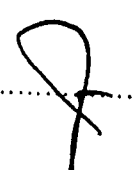
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd. M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	

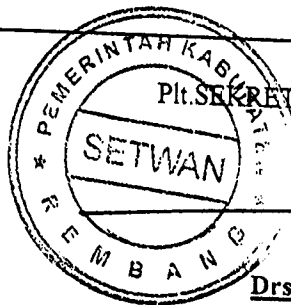
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

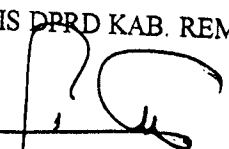
DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2017
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	 Bontarno, SH	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	 DARULWAN S	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7	 Mahzumi	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 



Plt. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

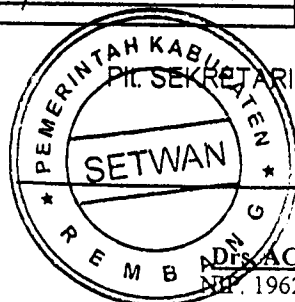

Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salim	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOVIH	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	Tasari	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyono	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Suyadi	8
9	CAMAT LASEM	P. E. D. A.	9
10	CAMAT PANCUR	Luharto	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Subay	12
13	CAMAT KRAGAN	M. Anis	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kurniyo	14



PI. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

ADIS ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620404 198803 1 011

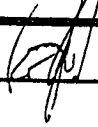
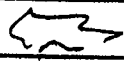
DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

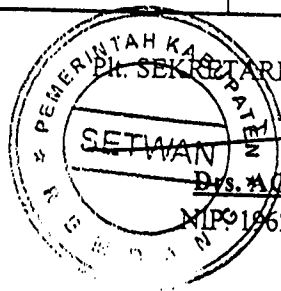
HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2017
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	M. effendi	As 3	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Alisana	Kebay	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Rukun P	Korab	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Wz H	Kebay	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Latiphe um	Kebay	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Tan Har jant	Kebay	14
15	BAG. UMUM	Gandant		15
16	BPPKAD	M. W. bin	Kebay	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	W. W. bin	Kebay	18
19	DINSOSP2KB	NGAT INI	Sekret	19
20	B K D			20
21	B P B D	P. W. bin	Kebay	21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	S. W. bin	Kebay	23
24	DINAS KESEHATAN	Ali Syarif	Kebay	24
25	DINDIKPORA			25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	Suratman		27

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Hsh Samuri	Kades	31
32	DINPERMADES			32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryosa	Sharifis	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS			35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN			36
37	DINAS PMPTSP NAKER	Sri Sugiyarti	Ht. Kuba	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Maryatin	Sh. Lempay	38
39	SATPOL PP	H. WALLEY		39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTAN KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA	<i>Kesepan</i>		84 <i>Oris</i>
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM			86
87	RADIO R2B _			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

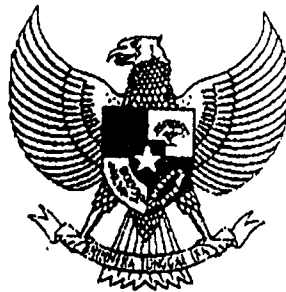
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
91	PKS Hbg	A. Goubi	Mak	91 
92	MIL. NIMBAR RAKYAT	H. MURCICH	PERKASI	92 
93	NUR ROHM	A. Warah		93 
94	NURROHMAN	Per Rbg		94 
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011



P E N G A N T A R
NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN

2017



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi
dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah,
Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
Kepala Bagian dan Camat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan
hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin
untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas
limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Nya, kita semua dapat menghadiri
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pengantar Nota
Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini telah kita awali dengan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 yang penyusunannya berpedoman kepada :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 019.6/704/2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
10. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 019.6/705/2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati,

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa

Adanya Kebijakan Pemerintah sebagai dasar terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa kepada Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 telah memenuhi syarat dalam Kebijakan Umum Anggaran untuk disusunnya Perubahan APBD, maka langkah yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah
2. Penyesuaian dan Pergeseran Anggaran Belanja Daerah
3. Penyesuaian Penerimaan Pembiayaan Daerah (SiLPA) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Berikut saya sampaikan Perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

PENDAPATAN DAERAH

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp.215.135.074.655,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.92.319.365.454,00 atau 42,91% sehingga menjadi Rp.307.454.440.109,00 dengan rincian:
 - Pajak Daerah sebesar Rp.52.140.500.000,00
 - Retribusi Daerah sebesar Rp.21.641.335.000,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.9.213.262.848,00
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.224.459.342.261,60
2. Dana Perimbangan semula Rp.1.077.387.567.211,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.23.360.161.789,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.100.747.729.000,00 dengan rincian:
 - Dana Transfer Umum semula Rp.882.034.026.211,00 berkurang sebesar Rp.67.021.771.211,00 sehingga menjadi sebesar Rp.815.012.255.000,00
 - Dana Transfer Khusus semula Rp.195.353.541.000,00 bertambah sebesar Rp.90.381.933.000,00 menjadi sebesar Rp.285.735.474.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp.261.940.242.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.92.310.420.000,00 atau 35,24% sehingga menjadi sebesar Rp.354.250.662.000,00 dengan rincian
 - ❖ Pendapatan Hibah sebesar Rp.2.566.904.000,00
 - ❖ Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.96.743.553.000,00
 - ❖ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.228.013.715.000,00

Total seluruh Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah Rp.1.762.452.831.109,60 naik sebesar Rp.207.989.947.243,00 atau 13,38% dari APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.554.462.883.866,00

BELANJA DAERAH

Pada sisi Belanja Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.228.361.792.933,00 terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.7.534.873.141,00 dengan rincian :

1. Belanja Pegawai turun sebesar Rp.78.883.450.141,00 karena adanya penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah berdasarkan jumlah guru PNSD penerima sertifikasi.
2. Belanja Hibah naik sebesar Rp.22.974.000.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp.1.813.000.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai Politik naik sebesar Rp.50.355.577.000,00
5. Belanja Tak Terduga turun sebesar Rp.168.000.000,00

Belanja Langsung

Pada Belanja Langsung terdapat kenaikan sebesar Rp.235.896.666.074,00 yang merupakan program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang.

Beberapa Program dan Kegiatan yang tertampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Ta

6. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
10. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Total seluruh Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah Rp.1966.429.061.301,60 atau naik sebesar Rp.228.361.792.933,60 atau (13,13%) dari APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.738.067.268.368,00

PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.25.081.521.908,58, yang semula Rp.189.794.384.502,00 menjadi Rp.214.875.906.410,58 karena adanya penyesuaian SiLPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada Pengeluaran Pembiayaan terdapat kenaikan sebesar Rp.4.709.676.218,58, yang semula Rp.6.190.000.000,00 menjadi sebesar Rp.10.899.676.218,58.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya sampaikan Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH

Rp. 1.762.452.831.109,60

Pendapatan Asli Daerah

Rp. 307.454.440.109,60

Hasil Pajak Daerah

Rp. 52.140.500.000,00

Hasil Retribusi Daerah

Rp. 21.641.335.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp. 9.213.262.848,00

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp. 224.459.342.261,60

Dana Perimbangan

Rp. 1.100.747.729.000,00

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	354.250.662.000,00
Hibah	Rp.	2.566.904.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	96.743.553.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	228.013.715.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	26.926.490.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.762.452.831.109,60

BELANJA DAERAH **Rp. 1.966.429.061.301,60**

Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.089.465.629.580,00
Belanja Pegawai	Rp.	656.864.414.859,00
Belanja Hibah	Rp.	50.088.202.500,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	9.562.000.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	6.455.961.000,00
---	-----	------------------

Belanja Bantuan Keuangan Kepada - Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	365.663.051.221,00
Belanja Tidak Terduga	Rp.	832.000.000,00

Belanja Langsung	Rp.	876.963.431.721,60
Belanja Pegawai	Rp.	187.251.900.433,20
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	269.810.429.393,40
Belanja Modal	Rp.	419.901.101.895,00

Jumlah Belanja Rp. 1.966.429.061.301,60

Surplus / (Defisit) Rp. (203.976.230.192,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp.	214.875.906.410,58
--	-----	--------------------

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 214.875.906.410,58

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penyertaan Modal	Rp.	8.189.000.000,00
Penyelesaian Retensi	Rp.	1.256.838.701,00
DAK Non Fisik	Rp.	1.450.868.938,00
Kas di Bendahara	Rp.	2.968.579,58

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 10.899.676.218,58

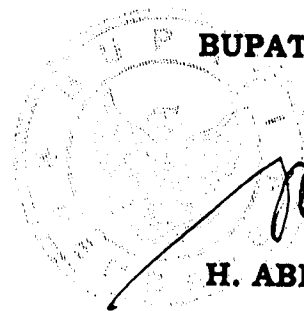
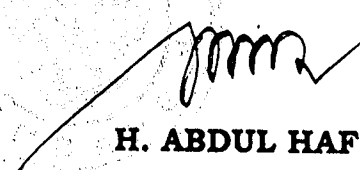
Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya Hormati,

Demikian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, untuk segera dibahas melalui mekanisme pembahasan di DPRD dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya tidak lupa saya menyampaikan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 25 September 2017

 **BUPATI REMBANG**

H. ABDUL HAFIDZ

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI – FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Disampaikan oleh : puji santoso

pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang, senin 25 September 2017

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, Segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan calon Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT , berkat nikmatNya pada hari ini kita dapat bertemu bertatap muka menghadiri sidang paripura tentang Rapeda APBD perubahan 2017 Kabupaten Rembang kali ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulalloh Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Perubahan APBD 2017, Demikian pula kepada saudara Bupati kami ucapkan banyak terima kasih atas

para pihak lainnya. Marilah kita jadikan rapat paripurna DPRD yang terhormat ini sebagai ajang silaturahmi yang mampu menyelesaikan misinformasi/ miskomunikasi antara legislative dan eksekutif.

Pimpinan sidang dan Hadirin yang berbahagia

Ijinkan kami menyampaikan :

- Selamat Tahun baru Islam 1 Muharram 1439H, Semoga ditahun yang baru ini kita bisa lebih meningkatkan Iman dan Taqwa kita kepada Allah SWT dan marilah Kita panjatkan segala Do'a dan harapan yang baru dan diampuni dosa-dosa kita...Amin
- Selamat Hari Tani Nasional, Bangsa yang hebat adalah Bangsa yang terpenuhi kebutuhan panganya sendiri, tetapi tidak membiarkan petani kerja sendiri.
- Bapak/Ibu dan hadirin semua, Sebentar lagi kita Bangsa Indonesia akan mengenang tragedi yang disebut Gerakan 30 September, 52 Tahun yang lalu menjadi titik awal perubahan dari orde lama ke orde baru, namun transisi itu dilalui dengan rentetan peristiwa yang kelam. Memang dalam tragedy tersebut banyak cerita atau banyak versi yang belakangan muncul perdebatan tentang perlu tidaknya pemerintah untuk kembali memutar film gerakan 30 September tersebut. Oleh karena itu kita sebagai warga Negara Indonesia yang ber-Pancasila dan ber-Bhineka Tunggal Ika agar tidak terprovokasi dengan hal tersebut, karena kita sudah bulat bahwa NKRI HARGA MATI....

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Mulyakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung peran pemkab Rembang dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pelayanan publik, implementasi regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.

APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan pemkab, muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Penertiban parkir di Kota Rembang khususnya seputar pasar rembang yang setiap saat selalu dikritik oleh masyarakat, semakin hari tidak semakin tertib, tetapi malah semakin semrawut. Untuk itu kami meminta segenap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat dalam masalah ini segera mengambil langkah kongkret.
2. Setiap panen Raya palawija, seperti Brambang dan cabai , Petani selalu dihadapkan pada harga jual yang sangat rendah sehingga petani tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya. Maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar supaya berupaya membantu petani untuk menghadapi masalah tersebut.
3. Penyerapan anggaran untuk Belanja public masih sangat rendah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar supaya memacu penyerapan anggaran belanja public tersebut. Mohon Saudara Bupati untuk mendorong semua OPD supaya melangkah lebih cepat demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.
4. Didalam Laporan Realisasi semester APBD induk Tahun 2017, dilaporkan bahwa pelaksanaan APBD 2017 sampai saat ini belum mencapai 45 persen, maka dalam hal ini agar penyerapan APBD Perubahan tahun 2017 bisa dikasimalkan, dengan harapan tidak terjadi SILPA yang tinggi.
5. Berkaitan dengan pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat desa, kami fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang memberi apresiasi kepada Bagian Tata Pemerintahan, yang telah merencanakan seleksi penerimaan Perangkat Desa secara serentak, yang dilakukan dengan cara bekerja bersama antara pihak Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pihak Perguruan Tinggi yang sesuai visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu BEKERJA BERSAMA.
6. Karena minimnya penyerapan anggaran Induk tahun 2017, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran anggaran di APBD Perubahan ini. Kami mengkhawatirkan akan terjadi tidak terpenuhinya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang kedepan supaya menyampaikan KUAPPAS jangan sampai terlambat sehingga ruang pembahasannya lebih luas.
8. Permen PU 31 tahun 2015 tidak boleh diadil

10. Kami juga berharap agar Pemkab Rembang memprioritaskan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, karena pada anggaran perubahan di akhir tahun 2017 ini adalah tahun dimana banyak terjadi bencana yg tidak bisa kita diprediksi, yang sedang terjadi pada sekarang ini dengan banyaknya desa-desa di Kabupaten Rembang yang mengalami kekeringan dan kurangnya kesediaan air bersih, belum lagi adanya bencana yang lain yang tidak bisa kita duga pada saat musim penghujan yang akan datang.
11. Dengan adanya kenaikan Belanja langsung sebesar 235,89 M, kami berharap benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati dan serius dengan memperhatikan waktu, konstruksi, cuaca dan lain sebagainya. Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan secara asal-asalan dan malas-malasan sehingga tidak berjalan secara maksimal. Khusus Dinas PUTR dan PU Perkim selaku Dinas Teknis tidak bergantung kepada Jasa Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas. Karena kita menemukan fakta dilapangan bahwa kualitas pekerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh jasa Konsultan, ternyata hasilnya TIDAK MAKSIMAL. Seperti pekerjaan yang ada DI Gayam Desa Ngemplak Kecamatan Lasem dengan anggaran yang dilelang dengan penawaran turun sebesar 28,23 persen (215,297 Juta) yang kualitasnya jauh dari harapan karena semunya tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah disepakati dalam kontrak. Mohon OPD yang bersangkutan segera mengecek dilapangan dan memanggil pihak Kontraktor.
12. Penyertaan Modal sebesar 8,189 Milyar yang ada dalam pengantar nota Keuangan yang disampaikan Saudara Bupati mohon dijabarkan secara Rinci peruntukannya.

Sidang dewan Yang Kami Mulyakan

Demikian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang ini kami sampaikan dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 25 September 2017
Fraksi –Fraksi DPRD Kabupaten Rembang

Fraksi PPP



SUGIHARTO
Ketua

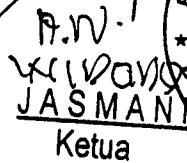
Fraksi Demokrat


EKA KARTIKA
Ketua

Fraksi PKB


MUHAMMAD IMRON
Ketua

Fraksi PDIP Nasdem


P.N. JASMANI
Ketua

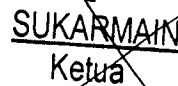
Fraksi Gerindra


H. CHASANUDDIN
Wakil Ketua

Fraksi Karya Sejahtera


H. ISMARI, SH
Ketua

Fraksi Harapan


SUKARMAIN
Ketua



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2017



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Penertiban parkir di Kota Rembang khususnya seputar pasar Rembang segera dilaksanakan dengan tindakan dan langkah konkret	Penertiban parkir yang dilakukan selama ini adalah penempatan petugas untuk mengatur parkir dan arus lalu lintas, namun hasilnya belum maksimal, untuk itu langkah yang ditempuh adalah sbb : a. Mengembalikan fungsi pasar, trotoar dan jalan sesuai dengan fungsinya, artinya semua pedagang harus masuk pasar, trotoar untuk pejalan kaki dan jalan untuk arus lalu lintas ; b. Mengadakan rekayasa lalu lintas satu arah ; c. Menempatkan petugas gabungan dari Dinas PERINDAGKOP dan UMKM, SATPOL PP dan Dinas Perhubungan.
2.	Harga jual bawang merah dan cabe rendah terhadap hasil panen petani di Kab. Rembang	Untuk mengatasi harga jual bawang merah dan cabai yang rendah saat panen kami akan menempuh beberapa langkah : a. Melaksanakan tunda jual, hasil panen bawang merah khususnya kita simpan terlebih dahulu baru kita jual saat harga tinggi ; b. Tanam diluar musim (off season) yaitu pada musim penghujan khususnya.
3.	Penyerapan anggaran untuk Belanja public masih rendah sehingga perlu dimaksimalkan	Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui optimalisasi fungsi ULP dimana s.d saat ini Jumlah paket pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan/seleksi : Jumlah paket : 142 paket Jumlah nilai : Rp. 247.202.515.842,- Yang telah selesai lelang dan penandatanganan kontrak 90 paket sebesar Rp. 148.349.231.140,- Sedangkan dalam tahap proses lelang ada 9 paket sementara 33 paket pada tahap pra lelang.
4.	Pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat desa dilaksanakan secara serentak dilakukan dengan cara bekerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Perguruan Tinggi	Terima kasih atas apresiasinya dan akan kami laksanakan tahapan dimaksud.
5.	Pergeseran anggaran induk tahun 2017 agar dapat memenuhi Visi Misi Pemerintah Kabupaten Rembang	Dalam rangka untuk percepatan proses pelaksanaan APBD kami telah melakukan evaluasi percepatan penyerapan anggaran serta melaksanakan rapat koordinasi lintas SKPD

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
8.	Permen PU 31 Tahun 2015 terhadap Penyerapan anggaran tahun 2017 harus dilaksanakan SKPD tanpa jasa konsultan	Langkah-langkah untuk mengatasi adanya Permen PU 31 Tahun 2015 : a. Mengoptimalkan pengawasan secara swakelola oleh tenaga tehnik yang kompeten; b. Melaksanakan secara berkelanjutan Pembinaan jasa konstruksi, utamanya terkait dengan sertifikasi tenaga ahli (SKA); c. Meningkatkan standart biaya jasa konsultan pengawas mendekati ketentuan Permen PU agar meningkatkan daya tarik para sarjana tehnik menjadi konsultan.
9.	Bantuan Keuangan kepada Desa secepatnya dicairkan	Bantuan Keuangan Desa sudah kami proses transfer untuk bln. April ADD Tahap I dan Dana Desa Tahap I sedangkan ADD Tahap ke II bln. Agustus untuk DD menunggu proses transfer dari Pemerintah Pusat Untuk Bantuan Keuangan bersifat khusus telah kami proses transfer ke Pemerintah Desa mulai Bln Agustus 2017.
10.	Anggaran pada BPBD guna menanggulangi bencana kekeringan dan dropping air bersih	Dalam APBD T.A 2017 pada BPBD Kab. Rembang telah dianggarkan Kegiatan : Fasilitasi Bencana kekeringan dan bantuan dropping air bersih semula Rp. 50.000.000,- ditambahi pada Rancangan Perubahan 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga total anggaran sebesar Rp. Rp. 100.000.000,-
11.	Dinas PUTR dan PERKIM TARU agar melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Fisik yang kualitas pekerjaannya jauh dari harapan	Dinas tehnik terkait telah melakukan monitoring lapangan dan akan segera menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan.
12.	Rincian Penyertaan Modal Rp. 8.189.000.000,-	Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017 : PD. BKK Kaliori 355.000.000,- PD. Percetakan Daerah 200.000.000,- PT. Bank Jateng 5.635.000.000,- PT. RME 999.000.000,- PDAM 1.000.000.000,- Jumlah 8.189.000.000,-

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

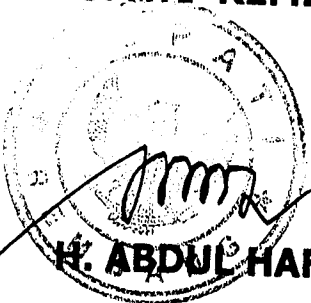
Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 25 September 2017

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : JUM'AT
Tanggal : 29 September 2017
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. SIFAT RAPAT : Terbuka
III. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;
2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
4. Persetujuan Penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, dilanjutkan Penandatanganan Persetujuan dan Penyerahan Keputusan DPRD;
5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 5 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 4 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 6 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 2 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 3 orang |
| Jumlah | <hr/> : 32 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 13 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan

mengikuti Rapat Paripurna Kedua membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Keabsahan kuorum rapat paripurna kedua ini adalah sama dengan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertama tanggal 25 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yaitu *Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.*

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 32 orang.

Dengan demikian kuorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 10.50 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selengkapnya akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna ini sesuai yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 18 September 2017, sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Pendapat Fraksi atas hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dilanjutkan penandatanganan persetujuan dan penyerahan Keputusan DPRD ;
5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
6. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Drs. Achmad Mualif berkenan menyampaikannya. Dipersilahkan.

===== LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD

Terima kasih Saudara Drs. Achmad Mualif yang telah menyampaikan Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Memasuki acara keempat yaitu Pendapat Fraksi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Kepada Saudara-saudara anggota yang ditunjuk untuk menyampaikan Pendapat Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : Sdr.Zaimul Umam NS |
| 2. Fraksi Demokrat | : Sdr. H. Hikmah Purnamawati |
| 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Sdr. Drs. H. Muh. Subawoto |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : Sdr. Nanik Sri Sundari |
| 5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | : Sdr. Puji Santoso, S.P., M.H. |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : Sdr. Gatot Paeran, S.H.,M.H. |
| 7. Fraksi Harapan | : Sdr. Sukarmain |

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

Nama Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaianannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran maupun pendapat dari masing-masing Fraksi, sudah dapat kita simpulkan apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat disetujui, disetujui dengan perubahan ataupun ditolak.

Sehubungan dalam persetujuannya perlu persetujuan secara lisan dari anggota DPRD, maka saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota yang hadir dalam rapat paripurna hari ini :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD melalui Laporannya dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Atas dasar persetujuan dari anggota, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan, penempatan, dan pengesahan Peraturan Daerah ini.

Untuk keperluan tersebut saya minta kepada Plt. Sekretaris DPRD berkenan memandu jalannya prosesi penandatanganan sekaligus penyerahan keputusan DPRD.

Waktu dan tempat dipersilahkan.

**=== PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD ===**

➤ *(Persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang terlampir)*

Terima kasih Saudara Drs. Achmad Mualif atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Demikian tadi telah kita lakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, selanjutnya marilah kita ikuti acara terakhir, acara kelima yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

==== PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA ====

➤ *(Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita ikuti, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD baik yang masuk dalam Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran, Plt. Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Dan kepada saudara-saudara yang telah mengikuti Rapat, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna pada hari ini.

Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

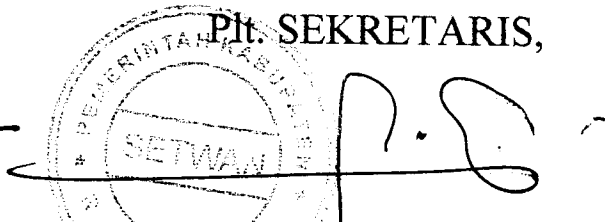
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA,



H. MAND KAMIL MZ

Plt. SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;-
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor : 900/...../ 2017, 900/...../ 2017 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2017
PUKUL : 09.00 WIB

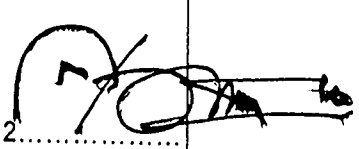
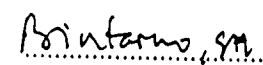
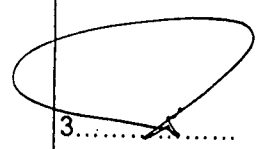
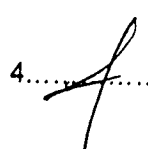
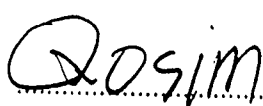
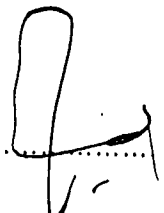
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUE	Wakil Ketua DPRD	19	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

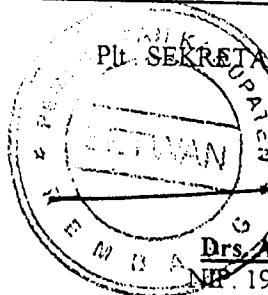
DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMBAHASAN RAPRERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 25 SEPTEMBER 2017

PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

Plt. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF

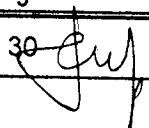
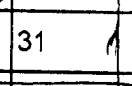
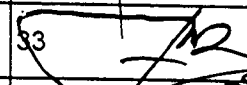
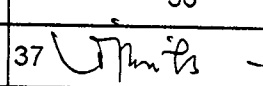
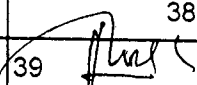
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMBAHASAN RAPRERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 25 SEPTEMBER 2017

PUKUL : 11.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	HARTI S	Kabag	1
2	STAF AHLI BUPATI	MUMPLIN		2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Non effendi	As 3	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	Harjo Doko P	Kabag.	9
10	BAG. HUMAS	Kecik	Kabag.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Kurni H	Kabag.	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laksono Aini		13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Ni Hartanto	Kabag.	14
15	BAG. UMUM	Gunawan		15
16	BPPKAD	Muslihi	Kabag.	16
17	INSPEKTORAT	FAHRUDDIN	INSPEKTOR	17
18	BAPPEDA	Eni Wahyuni H.	Kabag.	18
19	DINSOSP2KB	Agus Kurni H		19
20	B K D	Supriyati		20
21	B P B D	Purnomo Samudra		21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	Suyono PLK	Kabag.	23
24	DINAS KESEHATAN	Supriyati	Kabag.	24
25	DINDIKPORA	Agus Kurni H		25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINAS PERHUBUNGAN	SUYOWO	ke Dms	30 
31	DINAS DUKCAPIL	H. Daemir	Kadit	31 
32	DINPERMADES			32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SURYAWAN	Sek	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SUTARNO	ke Dms	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS			35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN			36
37	DINAS PMPTSP NAKER	Sri Sugiyarti	Plt.	37 
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	H. WALuyo	Sat Pol PP	39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM			86
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

50

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
91	MJL. MIMBAR RAKYAT	A. MUALIF	PEJABAT	91
92	Barisan / Capil			92
93	Jawa Pos Pabar Kudus	Kholid H.		93
94	TA FKS	Agca		94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

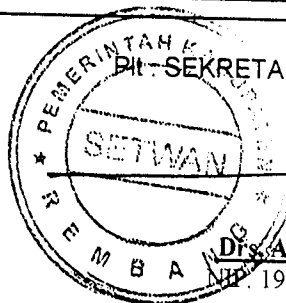
Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMBAHASAN RAPRERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 25 SEPTEMBER 2017
 PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	En Zaruo	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHO LIT	2
3	CAMAT SUMBER	K. MOANI	3
4	CAMAT SULANG	Stewart Haryank	4
5	CAMAT BULU	Taswadi	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. M. Yoni	6
7	CAMAT GUNEM	Ingjianto	7
8	CAMAT SALE	Hainyadi	8
9	CAMAT LASEM	Hayono	9
10	CAMAT PANCUR	Subanto	10
11	CAMAT SEDAN	SUBHAN	11
12	CAMAT SLUKE	Kusni	12
13	CAMAT KRAGAN	M. Aini	13
14	CAMAT SARANG		14

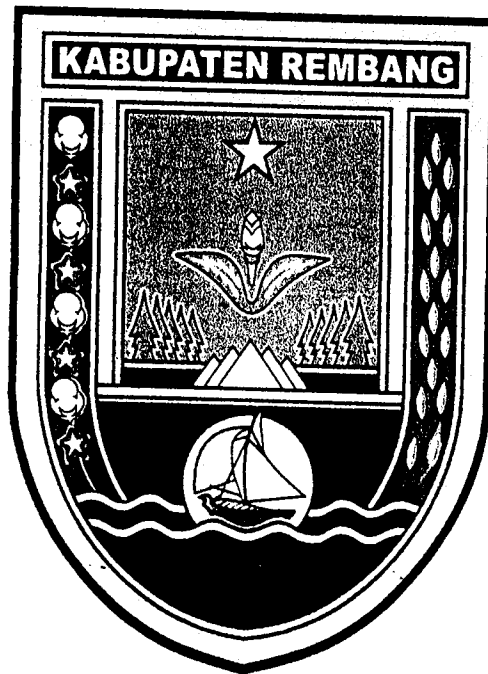


SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**



TENTANG

**PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telepon (0295) 691194

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
9. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/2006/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Pengiriman Raperda;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama TAPD Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 18 September 2017 yang mengagendakan Penjadwalan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 25 September 2017 Jam 14.00 WIB dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
- b. Rapat Badan Anggaran dan Pimpinan Komisi - komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 25 September 2017 Jam 15.00 WIB membahas Strategi dan distribusi Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
- c. Rapat-rapat Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 September 2017
Jam	: 09.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang
Acara	: Pendalaman Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017

- Acara : Penyusunan Laporan Komisi atas pendalaman Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017
- e. Rapat Badan Anggaran dan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
- Hari : Rabu
Tanggal : 27 September 2017
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi kepada Banggar atas pendalaman Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 .
- f. Rapat Internal Banggar pada :
- Hari : Rabu
Tanggal : 27 September 2017
Jam : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Membahas Laporan Komisi atas pendalaman Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017
- g. Rapat Badan Anggaran DPRD dan TAPD pada :
- Hari : Kamis
Tanggal : 28 September 2017
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi dan koordinasi hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

SKPD	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN		
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	
DAERAH	1.554.462.883.866,00	1.762.452.831.109,60	207.989.947.243,60	1.763.604.831.109,60	209.141.947.243,60	1.152.000.000,00	
Daerah	215.135.074.655,00	307.454.440.109,60	92.319.365.454,60	308.606.440.109,60	93.471.365.454,60	1.152.000.000,00	
Daerah	45.678.500.000,00	52.140.500.000,00	6.462.000.000,00	52.840.500.000,00	7.162.000.000,00	700.000.000,00	
Daerah	20.928.499.000,00	21.641.335.000,00	712.836.000,00	22.043.335.000,00	1.114.836.000,00	402.000.000,00	
Kekayaan Daerah yang	8.215.000.000,00	9.213.262.848,00	998.262.848,00	9.213.262.848,00	998.262.848,00	-	
tan Asli Daerah yang Sah	140.313.075.655,00	224.459.342.261,60	84.146.266.606,60	224.509.342.261,60	84.196.266.606,60	50.000.000,00	
an	1.077.387.567.211,00	1.100.747.729.000,00	23.360.161.789,00	1.100.747.729.000,00	23.360.161.789,00	-	
um	882.034.026.211,00	815.012.255.000,00	(67.021.771.211,00)	815.012.255.000,00	(67.021.771.211,00)	-	
usus	195.353.541.000,00	285.735.474.000,00	90.381.933.000,00	285.735.474.000,00	90.381.933.000,00	-	
atan Daerah yang Sah	261.940.242.000,00	354.250.662.000,00	92.310.420.000,00	354.250.662.000,00	92.310.420.000,00	-	
	1.566.904.000,00	2.566.904.000,00	1.000.000.000,00	2.566.904.000,00	1.000.000.000,00	-	
ajak dari pemerintah	81.510.000.000,00	96.743.553.000,00	15.233.553.000,00	96.743.553.000,00	15.233.553.000,00	-	
rintah daerah lainnya	178.863.338.000,00	228.013.715.000,00	49.150.377.000,00	228.013.715.000,00	49.150.377.000,00	-	
dan Otonomi Khusus	-	26.926.490.000,00	26.926.490.000,00	26.926.490.000,00	26.926.490.000,00	-	
n dari Provinsi atau	-	-	-	-	-	-	
n Lainnya	-	-	-	-	-	-	
DAERAH	1.738.067.268.368,00	1.966.429.061.301,60	228.361.792.933,60	1.969.034.898.819,18	230.967.630.451,18	2.605.837.517,58	
ngsung	1.697.000.502.721,00	1.089.465.629.580,00	(7.534.873.141,00)	1.088.950.398.159,58	(8.050.104.561,42)	(515.231.420,42)	
	735.747.865.000,00	656.864.414.859,00	(78.883.450.141,00)	656.867.383.438,58	(78.880.481.561,42)	2.968.579,58	
	-	-	-	-	-	-	
osial	27.114.202.500,00	50.088.202.500,00	22.974.000.000,00	49.773.202.500,00	22.659.000.000,00	(315.000.000,00)	
	11.375.000.000,00	9.562.000.000,00	(1.813.000.000,00)	9.512.000.000,00	(1.863.000.000,00)	(50.000.000,00)	
Kepada	6.455.961.000,00	6.455.961.000,00	-	6.455.961.000,00	-	-	
n/Kota dan Pemerintah	315.307.474.221,00	365.663.051.221,00	50.355.577.000,00	365.509.851.221,00	50.202.377.000,00	(153.200.000,00)	
euangan Kepada							
n/Kota, Pemerintah Desa							
uga	1.000.000.000,00	832.000.000,00	(168.000.000,00)	832.000.000,00	(168.000.000,00)	-	

SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN		
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4
	641.066.765.647,00	876.963.431.721,60	235.896.666.074,60	880.084.500.659,60	239.017.735.012,60	3.121.068.938,00
	161.317.139.776,00	187.251.900.433,20	25.934.760.657,20	187.798.256.773,20	26.481.116.997,20	546.356.340,00
Jasa	200.099.921.429,00	269.810.429.393,40	69.710.507.964,40	272.631.272.650,40	72.531.351.221,40	2.820.843.257,00
	279.649.704.442,00	419.901.101.895,00	140.251.397.453,00	419.654.971.236,00	140.005.266.794,00	(246.130.659,00)
	1.738.067.268.368,00	1.966.429.061.301,60	228.361.792.933,60	1.969.034.898.819,18	230.967.630.451,18	2.605.837.517,58
	(183.604.384.502,00)	(203.976.230.192,00)	(20.371.845.690,00)	(205.430.067.709,58)	(21.825.683.207,58)	(1.453.837.517,58)
						-
RAH						-
						-
						-
ayaan	189.794.384.502,00	214.875.906.410,58	25.081.521.908,58	214.875.906.410,58	25.081.521.908,58	-
an Anggaran Tahun ra (SILPA)	189.794.384.502,00	214.875.906.410,58	25.081.521.908,58	214.875.906.410,58	25.081.521.908,58	-
						-
Pembiayaan	189.794.384.502,00	214.875.906.410,58	25.081.521.908,58	214.875.906.410,58	25.081.521.908,58	-
ayaan	6.190.000.000,00	10.899.676.218,58	4.709.676.218,58	9.445.838.701,00	3.255.838.701,00	(1.453.837.517,58)
investasi) Pemerintah	6.190.000.000,00	8.189.000.000,00	1.999.000.000,00	8.189.000.000,00	1.999.000.000,00	-
i	-	1.256.838.701,00	1.256.838.701,00	1.256.838.701,00	1.256.838.701,00	-
	-	1.450.868.938,00	1.450.868.938,00	-	-	(1.450.868.938,00)
	-	2.968.579,58	2.968.579,58	-	-	(2.968.579,58)
						-
Pembiayaan	6.190.000.000,00	10.899.676.218,58	4.709.676.218,58	9.445.838.701,00	3.255.838.701,00	(1.453.837.517,58)
	183.604.384.502,00	203.976.230.192,00	20.371.845.690,00	205.430.067.709,58	21.825.683.207,58	1.453.837.517,58
						-
an anggaran tahun	-	-	-	-	-	-

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN 2017

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	4	5	6	7
1	DINPENDIKPORA	-	500.078.088.000,00	80.410.996.700,00	580.487.084.700,00
2	DINAS KESEHATAN	42.919.634.184,00	45.933.454.000,00	58.418.547.184,00	104.352.001.184,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	88.000.000.000,00	25.088.890.000,00	102.205.367.000,00	127.294.257.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.255.000.000,00	15.161.300.000,00	93.999.500.000,00	109.160.800.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	49.473.000.000,00	49.473.000.000,00
6	SATPOL PP	-	3.525.496.000,00	4.659.500.000,00	8.184.996.000,00
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	1.496.764.000,00	2.809.002.000,00	4.305.766.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.162.127.000,00	5.372.000.000,00	7.534.127.000,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	5.034.433.000,00	8.482.752.000,00	13.517.185.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	1.490.586.000,00	3.149.500.000,00	4.640.086.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121.472.000,00	13.017.335.000,00	28.248.500.000,00	41.265.835.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	2.747.592.000,00	5.872.200.000,00	8.619.792.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2.996.636.000,00	1.436.866.000,00	4.433.502.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	9.007.313.000,00	4.895.000.000,00	13.902.313.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.438.674.500,00	5.714.844.000,00	16.538.000.000,00	22.252.844.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	1.256.000.000,00	1.256.000.000,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.062.000.000,00	2.610.298.000,00	6.799.130.000,00	9.409.428.000,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2.048.742.000,00	3.025.082.000,00	5.073.824.000,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.296.285.265,00	4.221.585.000,00	21.085.377.642,00	25.306.962.642,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3.300.000.000,00	9.540.813.000,00	19.070.769.000,00	28.611.582.000,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	10.277.495.000,00	-	10.277.495.000,00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	767.037.000,00	-	767.037.000,00
23	SETDA	8.371.000.000,00	13.633.383.000,00	42.964.737.061,00	56.598.120.061,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	21.000.000,00	-	17.405.000.000,00	17.405.000.000,00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	670.000.000,00	670.000.000,00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90.000.000,00	13.633.383.000,00	16.172.000.000,00	29.805.383.000,00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45.000.000,00	-	2.764.500.000,00	2.764.500.000,00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	1.805.212.061,00	1.805.212.061,00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	1.815.000.000,00	1.815.000.000,00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	8.215.000.000,00	-	958.025.000,00	958.025.000,00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	3.918.796.000,00	30.178.291.000,00	34.097.087.000,00
25	KECAMATAN REMBANG	-	5.297.447.000,00	4.295.326.000,00	9.592.773.000,00
26	KECAMATAN KALIORI	-	2.090.850.000,00	623.244.000,00	2.714.094.000,00
27	KECAMATAN SULANG	-	1.855.144.000,00	3.804.200.000,00	5.659.344.000,00
28	KECAMATAN SUMBER	-	1.725.568.000,00	698.139.000,00	2.423.707.000,00
29	KECAMATAN BULU	-	1.686.054.000,00	695.150.000,00	2.381.204.000,00
30	KECAMATAN LASEM	-	2.037.944.000,00	689.731.600,00	2.727.675.600,00
31	KECAMATAN PANCUR	-	2.077.469.000,00	684.400.000,00	2.761.869.000,00
32	KECAMATAN SLUKE	-	1.525.858.000,00	935.770.000,00	2.461.628.000,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1.668.157.000,00	677.500.000,00	2.345.657.000,00
34	KECAMATAN GUNEM	-	1.677.129.000,00	548.887.000,00	2.226.016.000,00
35	KECAMATAN SALE	-	1.582.351.000,00	764.450.000,00	2.346.801.000,00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	1.953.432.000,00	852.830.460,00	2.806.262.460,00
37	KECAMATAN SEDAN	-	1.757.607.000,00	762.593.000,00	2.520.200.000,00
38	KECAMATAN SARANG	-	2.164.526.000,00	522.960.000,00	2.687.486.000,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	3.360.065.000,00	6.220.000.000,00	9.580.065.000,00
40	BAPPEDA	-	3.473.933.000,00	5.604.500.000,00	9.078.433.000,00
41	BADAN PENYADARAN PENCELAHAN	-	-	-	-

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		PERSETUJUAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	18	19	20	21	22=18+19+20+21
1	DINPENDIKPORA				56.932.800.000,00	56.932.800.000,00
2	DINAS KESEHATAN		292.600.000,00		42.360.998.904,00	42.653.598.904,00
3	RSU R. SOETRASNO				110.600.000.000,00	110.600.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.000.000.000,00		20.000.000,00	1.020.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.115.000.000,00			1.115.000.000,00
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121.472.000,00			121.472.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		130.000.000,00			130.000.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN		1.313.672.500,00			1.313.672.500,00
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		353.281.000,00			353.281.000,00
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.019.000.000,00		43.000.000,00	1.062.000.000,00
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.917.476.265,00		228.809.000,00	13.146.285.265,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		3.399.833.235,00		2.267.765,00	3.402.101.000,00
11	SEKRETARIAT DAERAH		156.000.000,00	9.213.262.848,00		9.369.262.848,00
	Bag. Umum		90.000.000,00			90.000.000,00
	Bag. Administrasi Perekonomian			9.213.262.848,00		9.213.262.848,00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		21.000.000,00			21.000.000,00
	Bag. Humas		45.000.000,00			45.000.000,00
12	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	52.840.500.000,00	225.000.000,00		14.321.466.592,60	67.386.966.592,60
	JUMLAH	52.840.500.000,00	22.043.335.000,00	9.213.262.848,00	224.509.342.261,60	308.606.440.109,60

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	23=18-3	24=19-4	25=20-5	26=21-6	27=23+24+25+26
1	DINPENDIKPORA	-	-	-	56.932.800.000,00	56.932.800.000,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	(266.035.280,00)	(266.035.280,00)
3	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	22.600.000.000,00	22.600.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	(1.235.000.000,00)	-	-	(1.235.000.000,00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	1.115.000.000,00	-	-	1.115.000.000,00
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	130.000.000,00	-	-	130.000.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	(125.002.000,00)	-	-	(125.002.000,00)
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	353.281.000,00	-	-	353.281.000,00
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	749.557.000,00	-	100.443.000,00	850.000.000,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	102.000.000,00	-	101.000,00	102.101.000,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	998.262.848,00	-	998.262.848,00
	Bag. Umum	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	998.262.848,00	-	998.262.848,00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
12	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	7.162.000.000,00	25.000.000,00	-	4.828.957.886,60	12.015.957.886,60
	JUMLAH	7.162.000.000,00	1.114.836.000,00	998.262.848,00	84.196.266.606,60	93.471.365.454,60

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	28=18-8	29=19-9	30=20-10	31=21-11	32
1	DINPENDIKPORA	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
3	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	300.000.000,00	-	50.000.000,00	350.000.000,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	102.000.000,00	-	-	102.000.000,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
	Bag. Umum	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
12	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	700.000.000,00	-	-	-	700.000.000,00
	JUMLAH	700.000.000,00	402.000.000,00	-	50.000.000,00	1.152.000.000,00

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		SEBELUM PERUBAHAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINPENDIKPORA	500.076.088.000,00							500.076.088.000,00
2	DINAS KESEHATAN	45.933.454.000,00							45.933.454.000,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	25.088.890.000,00							25.088.890.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.161.300.000,00							15.161.300.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
6	SATPOL PP	3.525.496.000,00							3.525.496.000,00
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.496.764.000,00							1.496.764.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.162.127.000,00							2.162.127.000,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.034.433.000,00							5.034.433.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.490.586.000,00							1.490.586.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13.017.335.000,00							13.017.335.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.747.592.000,00							2.747.592.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.996.636.000,00							2.996.636.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.007.313.000,00							9.007.313.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5.714.844.000,00							5.714.844.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.610.298.000,00							2.610.298.000,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.048.742.000,00							2.048.742.000,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.221.585.000,00							4.221.585.000,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	9.540.813.000,00							9.540.813.000,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.277.495.000,00							10.277.495.000,00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	767.037.000,00							767.037.000,00
23	SETDA	13.633.383.000,00							13.633.383.000,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	13.633.383.000,00							13.633.383.000,00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)								
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
24	SEKRETARIAT DPRD	3.918.796.000,00							3.918.796.000,00
25	KECAMATAN REMBANG	5.297.447.000,00							5.297.447.000,00
26	KECAMATAN KALIORI	2.090.850.000,00							2.090.850.000,00
27	KECAMATAN SULANG	1.855.144.000,00							1.855.144.000,00
28	KECAMATAN SUMBER	1.725.568.000,00							1.725.568.000,00
29	KECAMATAN BULU	1.686.054.000,00							1.686.054.000,00
30	KECAMATAN LASEM	2.037.944.000,00							2.037.944.000,00
31	KECAMATAN PANCUR	2.077.469.000,00							2.077.469.000,00
32	KECAMATAN SLUKE	1.525.858.000,00							1.525.858.000,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1.668.157.000,00							1.668.157.000,00
34	KECAMATAN GUNEM	1.677.129.000,00							1.677.129.000,00
35	KECAMATAN SALE	1.582.361.000,00							1.582.361.000,00
36	KECAMATAN KRAGAN	1.953.432.000,00							1.953.432.000,00
37	KECAMATAN SEDAN	1.757.607.000,00							1.757.607.000,00
38	KECAMATAN SARANG	2.164.526.000,00							2.164.526.000,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.360.065.000,00							3.360.065.000,00
40	BAPPEDA	3.473.933.000,00							3.473.933.000,00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.575.821.000,00		6.455.961.000,00	27.114.202.500,00	11.375.000.000,00	315.307.474.221,00	1.000.000.000,00	376.828.458.721,00
a	(SKPD)	15.575.821.000,00							15.575.821.000,00
b	(PPKD)			6.455.961.000,00	27.114.202.500,00	11.375.000.000,00	315.307.474.221,00	1.000.000.000,00	361.252.637.721,00
42	BKD	3.767.503.000,00							3.767.503.000,00
JUMLAH		735.747.865.000,00		6.455.961.000,00	27.114.202.500,00	11.375.000.000,00	315.307.474.221,00	1.000.000.000,00	1.007.000.602.324,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINPENDIKPORA	15.510.238.000,00	11.484.758.000,00	53.416.000.700,00	80.410.996.700,00
2	DINAS KESEHATAN	31.115.768.176,00	18.415.796.508,00	8.886.982.500,00	58.418.547.184,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44.832.244.000,00	32.772.845.000,00	24.600.278.000,00	102.205.367.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.379.754.000,00	2.536.246.000,00	88.083.500.000,00	93.999.500.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	407.550.000,00	680.450.000,00	48.385.000.000,00	49.473.000.000,00
6	SATPOL PP	2.562.690.000,00	1.948.934.000,00	147.876.000,00	4.659.500.000,00
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.786.570.000,00	1.022.432.000,00	-	2.809.002.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	800.005.000,00	1.471.995.000,00	3.100.000.000,00	5.372.000.000,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.764.711.000,00	4.600.541.000,00	1.117.500.000,00	8.482.752.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.106.255.000,00	2.025.565.000,00	17.680.000,00	3.149.500.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.341.926.000,00	24.873.524.000,00	1.033.050.000,00	28.248.500.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.633.555.000,00	3.372.645.000,00	866.000.000,00	5.872.200.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	469.305.000,00	860.151.000,00	107.410.000,00	1.436.866.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.211.265.000,00	3.424.235.000,00	259.500.000,00	4.895.000.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.458.130.000,00	11.582.280.000,00	3.497.590.000,00	16.538.000.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	496.800.000,00	721.824.000,00	37.376.000,00	1.256.000.000,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	885.360.000,00	1.636.220.000,00	4.277.550.000,00	6.799.130.000,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	601.009.000,00	1.661.657.000,00	762.416.000,00	3.025.082.000,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.339.036.000,00	4.668.836.000,00	12.077.505.642,00	21.085.377.642,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	1.785.529.000,00	3.270.456.000,00	14.014.784.000,00	19.070.769.000,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	19.719.180.000,00	20.631.487.061,00	2.614.070.000,00	42.964.737.061,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	13.405.900.000	3.880.100.000	119.000.000	17.405.000.000,00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	216.550.000	424.015.000	29.435.000	670.000.000,00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	1.859.850.000	12.212.150.000	2.100.000.000	16.172.000.000,00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	658.100.000	1.795.240.000	311.160.000	2.764.500.000,00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	853.880.000	951.332.061	-	1.805.212.061,00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	1.256.530.000	544.895.000	13.575.000	1.815.000.000,00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	346.920.000	592.105.000	19.000.000	958.025.000,00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	1.121.450.000	231.650.000	21.900.000	1.375.000.000,00
24	SEKRETARIAT DPRD	2.917.938.000,00	26.363.213.000,00	897.140.000,00	30.178.291.000,00
25	KECAMATAN REMBANG	1.212.455.000,00	1.096.701.400,00	1.986.169.600,00	4.295.326.000,00
26	KECAMATAN KALIORI	236.306.000,00	265.098.000,00	121.840.000,00	623.244.000,00
27	KECAMATAN SULANG	374.094.000,00	319.906.000,00	3.110.200.000,00	3.804.200.000,00
28	KECAMATAN SUMBER	246.235.000,00	301.534.000,00	150.370.000,00	698.139.000,00
29	KECAMATAN BULU	250.925.000,00	220.625.000,00	223.600.000,00	695.150.000,00
30	KECAMATAN LASEM	231.736.600,00	277.781.000,00	180.214.000,00	689.731.600,00
31	KECAMATAN PANCUR	239.360.000,00	251.240.000,00	193.800.000,00	684.400.000,00
32	KECAMATAN SLUKE	263.055.000,00	367.740.000,00	304.975.000,00	935.770.000,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	268.095.000,00	254.405.000,00	155.000.000,00	677.500.000,00
34	KECAMATAN GUNEM	212.350.000,00	191.845.000,00	144.692.000,00	548.887.000,00
35	KECAMATAN SALE	282.040.000,00	267.220.000,00	215.190.000,00	764.450.000,00
36	KECAMATAN KRAGAN	240.294.000,00	405.652.460,00	206.884.000,00	852.830.460,00
37	KECAMATAN SEDAN	344.850.000,00	202.493.000,00	215.250.000,00	762.593.000,00
38	KECAMATAN SARANG	240.200.000,00	275.760.000,00	7.000.000,00	522.960.000,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4.328.390.000,00	1.839.609.000,00	52.001.000,00	6.220.000.000,00
40	BAPPEDA	1.912.706.000,00	3.633.844.000,00	57.950.000,00	5.604.500.000,00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN	5.421.717.500,00	6.852.589.500,00	4.013.160.000,00	16.287.467.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SETELAH PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10 = 7+8+9
1	DINPENDIKPORA	34.164.674.950,00	40.677.097.798,00	91.598.087.952,00	166.439.860.700,00
2	DINAS KESEHATAN	33.500.437.583,20	39.335.535.101,40	34.318.793.501,00	107.154.766.185,60
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44.156.907.000,00	35.650.119.073,00	55.589.014.000,00	135.396.040.073,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.541.954.000,00	2.465.446.000,00	151.044.526.000,00	157.051.926.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	776.362.500,00	1.145.667.500,00	38.451.954.000,00	40.373.984.000,00
6	SATPOL PP	2.141.676.000,00	1.825.973.000,00	641.851.000,00	4.609.500.000,00
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.768.170.000,00	1.110.332.000,00	5.500.000,00	2.884.002.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	931.255.000,00	1.940.745.000,00	3.190.000.000,00	6.062.000.000,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.693.385.000,00	5.942.471.000,00	1.683.196.000,00	10.319.052.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.136.995.000,00	2.218.465.000,00	48.040.000,00	3.403.500.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.336.176.000,00	34.551.522.000,00	1.231.648.000,00	38.119.346.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.462.280.000,00	3.484.920.000,00	1.355.000.000,00	6.302.200.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.334.330.000,00	1.405.052.000,00	103.185.000,00	2.842.567.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.260.490.000,00	3.755.428.000,00	296.172.000,00	5.312.090.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.604.250.000,00	11.024.370.000,00	3.309.380.000,00	15.938.000.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	558.385.000,00	1.060.085.000,00	387.030.000,00	2.005.500.000,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	922.135.000,00	2.873.345.000,00	3.733.650.000,00	7.529.130.000,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	557.559.000,00	1.705.157.000,00	762.366.000,00	3.025.082.000,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.288.301.000,00	5.635.208.000,00	10.211.670.642,00	20.135.179.642,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	1.689.679.000,00	3.384.451.000,00	4.565.775.000,00	9.639.905.000,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	22.030.450.000,00	19.689.047.061,00	3.736.720.000,00	45.456.217.061,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	15.219.425.000	4.359.475.000	116.100.000	19.695.000.000,00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	220.150.000	425.415.000	24.435.000	670.000.000,00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	1.865.625.000	9.805.375.000	2.850.000.000	14.521.000.000,00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	683.950.000	2.110.040.000	420.510.000	3.214.500.000,00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	1.009.605.000	1.108.087.061	-	2.117.692.061,00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	1.631.675.000	572.850.000	50.475.000	2.255.000.000,00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	485.570.000	981.955.000	40.500.000	1.508.025.000,00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	914.450.000	325.850.000	234.700.000	1.475.000.000,00
24	SEKRETARIAT DPRD	3.733.683.000,00	26.990.337.000,00	987.916.000,00	31.711.936.000,00
25	KECAMATAN REMBANG	1.212.455.000,00	1.096.701.400,00	1.986.169.600,00	4.295.326.000,00
26	KECAMATAN KALIORI	242.006.000,00	285.803.500,00	95.434.500,00	623.244.000,00
27	KECAMATAN SULANG	387.644.000,00	326.356.000,00	3.230.200.000,00	3.944.200.000,00
28	KECAMATAN SUMBER	245.435.000,00	312.334.000,00	50.370.000,00	608.139.000,00
29	KECAMATAN BULU	250.925.000,00	220.625.000,00	223.600.000,00	695.150.000,00
30	KECAMATAN LASEM	219.404.900,00	277.781.000,00	202.545.700,00	699.731.600,00
31	KECAMATAN PANCUR	234.210.000,00	266.390.000,00	193.800.000,00	694.400.000,00
32	KECAMATAN SLUKE	268.855.000,00	361.940.000,00	304.975.000,00	935.770.000,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	298.345.000,00	247.905.000,00	141.250.000,00	687.500.000,00
34	KECAMATAN GUNEM	202.100.000,00	204.695.000,00	142.092.000,00	548.887.000,00
35	KECAMATAN SALE	289.440.000,00	263.820.000,00	211.190.000,00	764.450.000,00
36	KECAMATAN KRAGAN	248.544.000,00	407.402.460,00	206.884.000,00	862.830.460,00
37	KECAMATAN SEDAN	314.430.000,00	210.313.000,00	237.850.000,00	762.593.000,00
38	KECAMATAN SARANG	248.200.000,00	277.760.000,00	7.000.000,00	532.960.000,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	5.229.740.000,00	2.385.679.000,00	129.281.000,00	7.744.700.000,00
40	BAPPEDA	2.176.406.000,00	4.114.269.000,00	148.825.000,00	6.439.500.000,00
41	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN	5.919.037.500,00	7.528.000.000,00	-	13.447.037.500,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11 = 7-3	12 = 8-4	13 = 9-5	14 = 11+12+13
1	DINPENDIKPORA	18.654.436.950,00	29.192.339.798,00	38.182.087.252,00	86.028.864.000,00
2	DINAS KESEHATAN	2.384.669.407,20	20.919.738.593,40	25.431.811.001,00	48.736.219.001,60
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(675.337.000,00)	2.877.274.073,00	30.988.736.000,00	33.190.673.073,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162.200.000,00	(70.800.000,00)	62.961.026.000,00	63.052.426.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	368.812.500,00	465.217.500,00	(9.933.046.000,00)	(9.099.016.000,00)
6	SATPOL PP	(421.014.000,00)	(122.961.000,00)	493.975.000,00	(50.000.000,00)
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(18.400.000,00)	87.900.000,00	5.500.000,00	75.000.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	131.250.000,00	468.750.000,00	90.000.000,00	690.000.000,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(71.326.000,00)	1.341.930.000,00	565.696.000,00	1.836.300.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	30.740.000,00	192.900.000,00	30.360.000,00	254.000.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(5.750.000,00)	9.677.998.000,00	198.598.000,00	9.870.846.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(171.275.000,00)	112.275.000,00	489.000.000,00	430.000.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	865.025.000,00	544.901.000,00	(4.225.000,00)	1.405.701.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	49.225.000,00	331.193.000,00	36.672.000,00	417.090.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	146.120.000,00	(557.910.000,00)	(188.210.000,00)	(600.000.000,00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61.585.000,00	338.261.000,00	349.654.000,00	749.500.000,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	36.775.000,00	1.237.125.000,00	(543.900.000,00)	730.000.000,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(43.450.000,00)	43.500.000,00	(50.000,00)	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(50.735.000,00)	966.372.000,00	(1.865.835.000,00)	(950.198.000,00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	(95.850.000,00)	113.995.000,00	(9.449.009.000,00)	(9.430.864.000,00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	2.311.270.000,00	(942.440.000,00)	1.122.650.000,00	2.491.480.000,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	1.813.525.000,00	479.375.000,00	(2.900.000,00)	2.290.000.000,00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	3.600.000,00	1.400.000,00	(5.000.000,00)	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	5.775.000,00	(2.406.775.000,00)	750.000.000,00	(1.651.000.000,00)
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	25.850.000,00	314.800.000,00	109.350.000,00	450.000.000,00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	155.725.000,00	156.755.000,00	-	312.480.000,00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	375.145.000,00	27.955.000,00	36.900.000,00	440.000.000,00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	138.650.000,00	389.850.000,00	21.500.000,00	550.000.000,00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(207.000.000,00)	94.200.000,00	212.800.000,00	100.000.000,00
24	SEKRETARIAT DPRD	815.745.000,00	627.124.000,00	90.776.000,00	1.533.645.000,00
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	5.700.000,00	20.705.500,00	(26.405.500,00)	-
27	KECAMATAN SULANG	13.550.000,00	6.450.000,00	120.000.000,00	140.000.000,00
28	KECAMATAN SUMBER	(800.000,00)	10.800.000,00	(100.000.000,00)	(90.000.000,00)
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	(12.331.700,00)	-	22.331.700,00	10.000.000,00
31	KECAMATAN PANCUR	(5.150.000,00)	15.150.000,00	-	10.000.000,00
32	KECAMATAN SLUKE	5.800.000,00	(5.800.000,00)	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	30.250.000,00	(6.500.000,00)	(13.750.000,00)	10.000.000,00
34	KECAMATAN GUNEM	(10.250.000,00)	12.850.000,00	(2.600.000,00)	-
35	KECAMATAN SALE	7.400.000,00	(3.400.000,00)	(4.000.000,00)	-
36	KECAMATAN KRAGAN	8.250.000,00	1.750.000,00	-	10.000.000,00
37	KECAMATAN SEDAN	(30.420.000,00)	7.820.000,00	22.600.000,00	-
38	KECAMATAN SARANG	8.000.000,00	2.000.000,00	-	10.000.000,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	901.350.000,00	546.070.000,00	77.280.000,00	1.524.700.000,00
40	BAPPEDA	263.700.000,00	480.425.000,00	90.875.000,00	835.000.000,00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN	527.320.000,00	670.480.000,00	377.500.000,00	1.575.300.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	15	16	17	18 = 15+16+17
1	DINPENDIKPORA	34.368.255.290,00	41.713.506.055,00	92.008.968.293,00	168.090.729.638,00
2	DINAS KESEHATAN	33.523.937.583,20	39.409.535.101,40	34.241.293.501,00	107.174.766.185,60
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44.156.907.000,00	35.650.119.073,00	55.589.014.000,00	135.396.040.073,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM.DAN.PENATAAN RUANG	3.674.480.000,00	2.609.646.000,00	151.192.800.000,00	157.476.926.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	776.362.500,00	1.145.667.500,00	37.641.954.000,00	39.563.984.000,00
6	SATPOL PP	2.134.276.000,00	1.833.373.000,00	641.851.000,00	4.609.500.000,00
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.768.170.000,00	1.110.332.000,00	5.500.000,00	2.884.002.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	928.605.000,00	2.283.395.000,00	3.260.000.000,00	6.472.000.000,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.693.385.000,00	5.942.471.000,00	1.683.196.000,00	10.319.052.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.196.995.000,00	2.334.965.000,00	61.540.000,00	3.593.500.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.343.476.000,00	34.444.222.000,00	1.231.648.000,00	38.019.346.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.462.280.000,00	3.484.920.000,00	1.355.000.000,00	6.302.200.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.334.330.000,00	1.405.052.000,00	103.185.000,00	2.842.567.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.249.390.000,00	3.771.528.000,00	296.172.000,00	5.317.090.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.604.250.000,00	11.026.655.000,00	3.307.095.000,00	15.938.000.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	558.385.000,00	1.060.085.000,00	387.030.000,00	2.005.500.000,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	922.135.000,00	2.873.345.000,00	3.733.650.000,00	7.529.130.000,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	557.559.000,00	1.705.157.000,00	762.366.000,00	3.025.082.000,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.288.301.000,00	5.635.208.000,00	10.211.670.642,00	20.135.179.642,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	1.764.679.000,00	3.659.451.000,00	4.565.775.000,00	9.989.905.000,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	22.108.975.000,00	20.113.722.061,00	3.736.720.000,00	45.959.417.061,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	15.221.450.000	4.357.450.000	116.100.000	19.695.000.000,00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	220.150.000	425.415.000	24.435.000	670.000.000,00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	1.865.625.000	9.805.375.000	2.850.000.000	14.521.000.000,00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	683.950.000	2.110.040.000	420.510.000	3.214.500.000,00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	1.061.605.000	1.109.287.061	-	2.170.892.061,00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	1.631.675.000	572.850.000	50.475.000	2.255.000.000,00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	510.070.000	1.407.455.000	40.500.000	1.958.025.000,00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	914.450.000	325.850.000	234.700.000	1.475.000.000,00
24	SEKRETARIAT DPRD	3.733.683.000,00	27.467.337.000,00	987.916.000,00	32.188.936.000,00
25	KECAMATAN REMBANG	1.212.455.000,00	1.096.701.400,00	1.986.169.600,00	4.295.326.000,00
26	KECAMATAN KALIORI	242.006.000,00	285.803.500,00	95.434.500,00	623.244.000,00
27	KECAMATAN SULANG	387.644.000,00	326.356.000,00	3.230.200.000,00	3.944.200.000,00
28	KECAMATAN SUMBER	247.910.000,00	309.859.000,00	50.370.000,00	608.139.000,00
29	KECAMATAN BULU	258.625.000,00	212.925.000,00	223.600.000,00	695.150.000,00
30	KECAMATAN LASEM	219.404.900,00	277.781.000,00	202.545.700,00	699.731.600,00
31	KECAMATAN PANCUR	234.210.000,00	266.390.000,00	193.800.000,00	694.400.000,00
32	KECAMATAN SLUKE	268.855.000,00	361.940.000,00	304.975.000,00	935.770.000,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	298.345.000,00	247.905.000,00	141.250.000,00	687.500.000,00
34	KECAMATAN GUNEM	202.100.000,00	204.695.000,00	142.092.000,00	548.887.000,00
35	KECAMATAN SALE	289.440.000,00	263.820.000,00	211.190.000,00	764.450.000,00
36	KECAMATAN KRAGAN	248.544.000,00	407.402.460,00	206.884.000,00	862.830.460,00
37	KECAMATAN SEDAN	314.430.000,00	210.313.000,00	237.850.000,00	762.593.000,00
38	KECAMATAN SARANG	248.200.000,00	277.760.000,00	7.000.000,00	532.960.000,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	5.229.740.000,00	2.385.679.000,00	129.281.000,00	7.744.700.000,00
40	BAPPEDA	2.146.106.000,00	4.144.569.000,00	148.825.000,00	6.439.500.000,00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN	5.949.037.500,00	3.500.000.000,00	-	9.449.037.500,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	19 = 15-3	20 = 16-4	21 = 17-5	22 = 19+20+21
1	DINPENDIKPORA	18.858.017.290,00	30.228.748.055,00	38.592.967.593,00	87.679.732.938,00
2	DINAS KESEHATAN	2.408.169.407,20	20.993.738.593,40	25.354.311.001,00	48.756.219.001,60
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(675.337.000,00)	2.877.274.073,00	30.988.736.000,00	33.190.673.073,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	294.726.000,00	73.400.000,00	63.109.300.000,00	63.477.426.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	368.812.500,00	465.217.500,00	(10.743.046.000,00)	(9.909.016.000,00)
6	SATPOL PP	(428.414.000,00)	(115.561.000,00)	493.975.000,00	(50.000.000,00)
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(18.400.000,00)	87.900.000,00	5.500.000,00	75.000.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	128.600.000,00	811.400.000,00	160.000.000,00	1.100.000.000,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(71.326.000,00)	1.341.930.000,00	565.696.000,00	1.836.300.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	90.740.000,00	309.400.000,00	43.860.000,00	444.000.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.550.000,00	9.570.698.000,00	198.598.000,00	9.770.846.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(171.275.000,00)	112.275.000,00	489.000.000,00	430.000.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	865.025.000,00	544.901.000,00	(4.225.000,00)	1.405.701.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38.125.000,00	347.293.000,00	36.672.000,00	422.090.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	146.120.000,00	(555.625.000,00)	(190.495.000,00)	(600.000.000,00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61.585.000,00	338.261.000,00	349.654.000,00	749.500.000,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	36.775.000,00	1.237.125.000,00	(543.900.000,00)	730.000.000,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(43.450.000,00)	43.500.000,00	(50.000,00)	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(50.735.000,00)	966.372.000,00	(1.865.835.000,00)	(950.198.000,00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	(20.850.000,00)	388.995.000,00	(9.449.009.000,00)	(9.080.864.000,00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	2.389.795.000,00	(517.765.000,00)	1.122.650.000,00	2.994.680.000,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	1.815.550.000,00	477.350.000,00	(2.900.000,00)	2.290.000.000,00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	3.600.000,00	1.400.000,00	(5.000.000,00)	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	5.775.000,00	(2.406.775.000,00)	750.000.000,00	(1.651.000.000,00)
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	25.850.000,00	314.800.000,00	109.350.000,00	450.000.000,00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	207.725.000,00	157.955.000,00	-	365.680.000,00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	375.145.000,00	27.955.000,00	36.900.000,00	440.000.000,00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	163.150.000,00	815.350.000,00	21.500.000,00	1.000.000.000,00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(207.000.000,00)	94.200.000,00	212.800.000,00	100.000.000,00
24	SEKRETARIAT DPRD	815.745.000,00	1.104.124.000,00	90.776.000,00	2.010.645.000,00
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	5.700.000,00	20.705.500,00	(26.405.500,00)	-
27	KECAMATAN SULANG	13.550.000,00	6.450.000,00	120.000.000,00	140.000.000,00
28	KECAMATAN SUMBER	1.675.000,00	8.325.000,00	(100.000.000,00)	(90.000.000,00)
29	KECAMATAN BULU	7.700.000,00	(7.700.000,00)	-	-
30	KECAMATAN LASEM	(12.331.700,00)	-	22.331.700,00	10.000.000,00
31	KECAMATAN PANCUR	(5.150.000,00)	15.150.000,00	-	10.000.000,00
32	KECAMATAN SLUKE	5.800.000,00	(5.800.000,00)	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	30.250.000,00	(6.500.000,00)	(13.750.000,00)	10.000.000,00
34	KECAMATAN GUNEM	(10.250.000,00)	12.850.000,00	(2.600.000,00)	-
35	KECAMATAN SALE	7.400.000,00	(3.400.000,00)	(4.000.000,00)	-
36	KECAMATAN KRAGAN	8.250.000,00	1.750.000,00	-	10.000.000,00
37	KECAMATAN SEDAN	(30.420.000,00)	7.820.000,00	22.600.000,00	-
38	KECAMATAN SARANG	8.000.000,00	2.000.000,00	-	10.000.000,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	901.350.000,00	546.070.000,00	77.280.000,00	1.524.700.000,00
40	BAPPEDA	233.400.000,00	510.725.000,00	90.875.000,00	835.000.000,00
41	BADAN PENDAPATAN PENGELUARAN	527.000.000,00	-	-	-

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26 = 23+24+25
1	DINPENDIKPORA	203.580.340,00	1.036.408.257,00	410.880.341,00	1.650.868.938,00
2	DINAS KESEHATAN	23.500.000,00	74.000.000,00	(77.500.000,00)	20.000.000,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	132.526.000,00	144.200.000,00	148.274.000,00	425.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	(810.000.000,00)	(810.000.000,00)
6	SATPOL PP	(7.400.000,00)	7.400.000,00	-	-
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(2.650.000,00)	342.650.000,00	70.000.000,00	410.000.000,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	60.000.000,00	116.500.000,00	13.500.000,00	190.000.000,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7.300.000,00	(107.300.000,00)	-	(100.000.000,00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(11.100.000,00)	16.100.000,00	-	5.000.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	2.285.000,00	(2.285.000,00)	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	75.000.000,00	275.000.000,00	-	350.000.000,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	78.525.000,00	424.675.000,00	-	503.200.000,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	2.025.000,00	(2.025.000,00)	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	52.000.000,00	1.200.000,00	-	53.200.000,00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	24.500.000,00	425.500.000,00	-	450.000.000,00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	477.000.000,00	-	477.000.000,00
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	2.475.000,00	(2.475.000,00)	-	-
29	KECAMATAN BULU	7.700.000,00	(7.700.000,00)	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-
40	BAPPEDA	(30.300.000,00)	30.300.000,00	-	-

B. REKOMENDASI

Saudara Bupati menugaskan Satpol PP guna menegakkan Perda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dikarenakan masih ada transaksi jual beli diluar Tempat Pelelangan Ikan, sehingga tidak ada pemasukan retribusi atas transaksi tersebut.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 29 September 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
BADAN ANGGARAN**

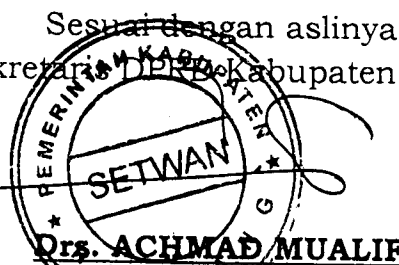
Ketua,
ttd

H. MAJID KAMIL MZ

Sekretaris
ttd

Drs. ACHMAD MUALIF

Sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

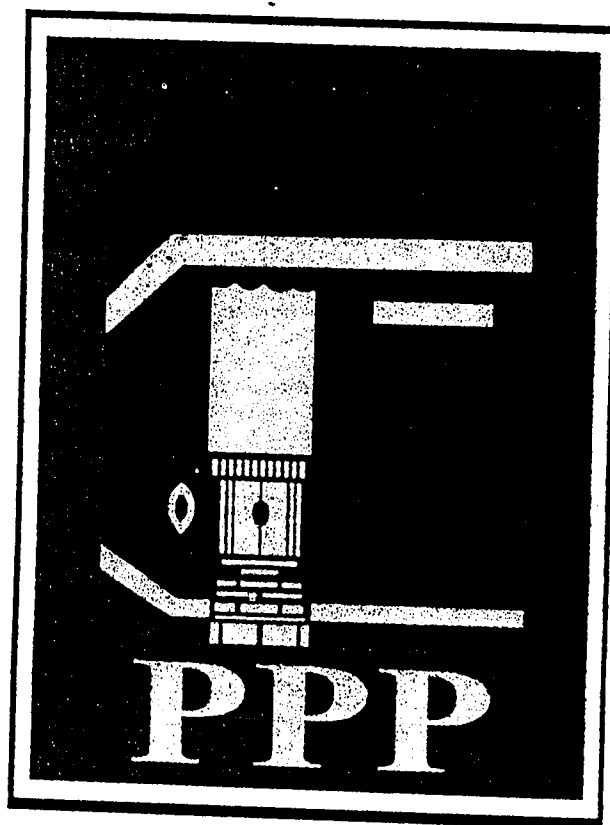
PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Hari : SENIN, 29 SEPTEMBER 2017
Dibacakan Oleh : ZAIMUL UMAM NS.**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2017

Jum'at , 29 September 2017

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat-Pagi , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Laahaula walaa quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

=> sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Plt. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW .

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami , terhadap Rancangan Perda , tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2017.

Setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati , dalam rapat paripurna ke I , pada hari Senin , tanggal 25 September 2017 , terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , dan selanjutnya dilakukan pembahasan melalui rapat-rapat ditingkat Komisi bersama OPD terakait , Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi , dan Rapat Banggar dengan TAPD , Alkhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang direncanakan .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup mendalam, dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah , tentang Perubahan APBD tahun 2017 ini, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan , ***Dengan mengucan***

Di dalam Pendapat akhir ini , Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan beberapa catatan , sebagai usulan dan masukan , antara lain sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Rencana Pengisian Perangkat desa secara serentak ditahun 2017 , sampai kemarim waktu pembahasan Raperda ini, masih banyak ditemukan desa yang belum membuat Perdes tentang SOTK , agar pelaksanaan pengisian Perangkat Desa benar-benar sesuai dengan waktu yang direncanakan , kami usulkan supaya Bagian Tapem bersama Camat, Mendorong dan Memfasilitasi serta sekaligus melakukan sosialisasi , tentang tatacara seleksi perekrutan Perangkat desa tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang ada .
2. Guna meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit , bahwa RSUD dr. Soetrasno akan membeli peralatan diantaranya Ct scan dan alat kesehatan lain , dengan dana pinjaman dari Bank sbesar 20 milyar , dalam hal tersebut , apabila persyaratan administrasi dan ketentuan syarat lainnya sudah cukup terpenuhi , serta agar peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD segera terwujud , Kami sependapat untuk segera direalisasikan.
3. Berkaitan dengan usulan belanja Hibah / Bansos , setelah proposal diajukan dan telah memenuhi persyaratan, dan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan verifikasi oleh Tim OPD terkait, kami minta agar hasil Verifikasi tersebut, bisa segera diinformasikan pada publik, terutama kepada pemohon , disetujui atau tidak usulanya , agar masyarakat tidak cemas dan bahkan kecewa .
4. Berkaitan dengan KUA / PPAS Induk Tahun Anggaran 2018 , yang beberapa saat waktu mendatang harus segera kita lakukan pembahasan , Kami minta kepada Pemkab Rembang , agar TAPD segera menyusun Rancangan KUA / PPAS tersebut, dan mengirimkan ke DPRD , untuk selanjutnya segera dilakukan pembahasan . Hal ini penting , agar didapat waktu yang cukup utnuk melakukan pencermatan materi , sehingga didapatkan hasil yang lebih baik .

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini , Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan kemudahan, sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil dan bermanfaat, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

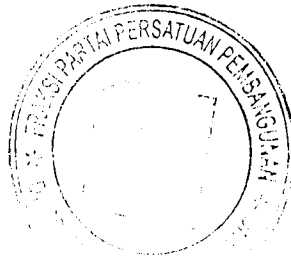
Wallahul Muwaffiq Illaa aqwamitthoorik

Rembang , 29 September 2017

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

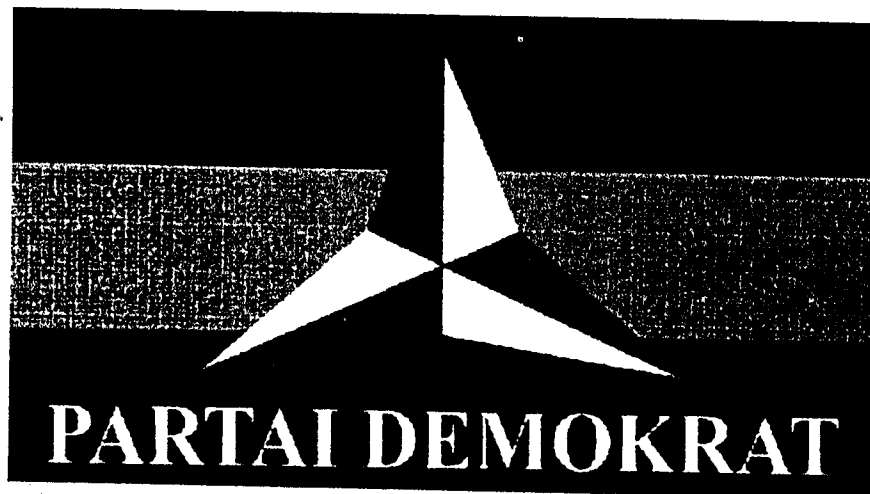

SUGIHARTO



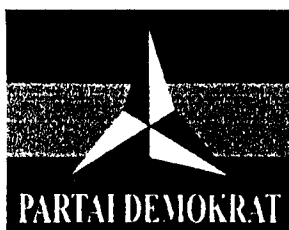
SEKRETARIS


ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017**

JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2017

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi Demokrat, sebagai insan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2017

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Syukur alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan mulai awal sampai selesai berjalan dengan lancar.

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohiimi kami Fraksi Demokrat menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun 2017 menjadi PERDA Perubahan APBD Tahun 2017.

Setelah kita menyetujui Raperda ini menjadi Perda Kami Fraksi Demokrat berharap supaya dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan tuntas dan jangan sampai ada yang tertinggal lagi.

Dengan penyampaian pendapat akhir. Fraksi Demokrat ini, Kami kembali memberikan beberapa saran, pendapat, dan masukan demi kebaikan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini, antara lain :

1. Kami Fraksi Demokrat berharap supaya Pemerintah Kabupaten Rembang bergerak cepat diperubahan ini karena adanya kegiatan fisik yang harus selesai awal desember.

2. Kami Fraksi Demokrat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya menginstruksikan kepada semua Kepala OPD untuk segera menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, karena ini merupakan tolak ukur penilaian ini.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 29 September 2017

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SEKRETARIS



EKA SISWA KARTIKA

WARDATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat Akhir

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAB BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

disampaikan oleh H.Subawoto



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat AKhir

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

disampaikan oleh H.Subawoto

pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang
Jum'at 29 September 2017

Assalamu 'alaikum wr wb.

- ❖ Yang Kami Hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang
- ❖ Yang Kami Hormati, Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang
- ❖ Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- ❖ Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.
- ❖ Yang kami Hormati, kawan kawan pers...

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.....

Alhamdulillah , segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menyimak Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017.

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir ini, izikanlah kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengucapkan dan mengingatkan kita pada peristiwa 30 September. Dengan semangat persatuan melalui peringatan 30 September marilah kita bersama-sama untuk bersinergi menghadapi segala ancaman atau perubahan dengan kreatifitas dan inovatif , dalam memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia secara optimal,. Semangat mengenang peristiwa 30 September ini bukan untuk diajarkan, akan tetapi untuk ditularkan kepada seluruh generasi penerus bangsa atas ancaman komunis atau faham Radikal.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan : **Pendapat Akhir Fraksi PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Rerubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017.**

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.....

Setelah mencermati dan mempelajari, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan-catatan dan saran sebagai bagian dari pendapat Fraksi , yaitu :

1. FPKB berharap Untuk pembahasan Anggaran yang akan datang mohon tidak terulang kembali dengan tidak diberikanya RKA bagi anggota DPRD, jadi dalam pembahasan seperti layaknya fit and proper test
2. FPKB berharap Dinas PU.TR dan PERKIM lebih agresip dalam penyerapan anggaran , jangan sampai kejadian penyerapan anggaran yg minim pada tahun anggaran sebelumnya terulang kembali, biar **target Pemerintah Kabupaten Rembang di tahun 2018 tanpa jalan berlubang dapat kita capai.**
3. FPKB berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang memfasilitasi secara maksimal perekrutan atau pengangkatan perangkat desa dengan pihak ketiga/Perguruan Tinggi, Agar supaya dalam proses perekrutan tidak dijual belikan secara masiv atau fulgar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

Pada Akhirnya ***dengan Mengucap :***

"Bismillahirrohmannirrohim"

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan dapat **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab.Rembang Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan yang Kami Mulyakan.....

Di akhir penyampaian Pendapat Akhir, Kami Fraksi PKB sekali lagi berharap agar penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan Daerah, dan mampu **menjadikan Kabupaten Rembang sebagai kota yang peduli wong cilik dengan nyemanak nyedulur.**

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PKB , semoga bermanfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Rembang yang kami cintai. semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan jalan yang benar bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

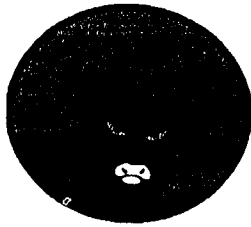
Rembang , 29 September 2017

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Rembang

Ketua Sekretaris

Muhammad Imron Ilyas





PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Terhadap

Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2017

Tanggal : 29 September 2017

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

**Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab.
Rembang**

**Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan Setda Kab.
Rembang**

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Pertama – tama mari kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas nikmatNya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita mintai pertolongan di yaumill akhir nantinnnya.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Sebelum membacakan poin – poin yang menjadi perhatian kami dalam Pendapat Akhir Fraksi ini, dalam rangka menyambut hari kesaktian Pancasila pada tanggal 1 oktober yang jatuh pada hari minggu, kami ingin menyampaikan bahwa dengan memperingati hari kesaktian Pancasila yang merupakan dasar Negara Indonesia menjadikan kita mengingat kembali momen – momen tersebut.

Setelah melaksanakan pembahasan di tingkat komisi – komisi dengan dinas terkait dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan bahwa pada hari ini kita melaksanakan Sidang Paripurna dengan acara penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2017. Dalam menyampaikan pendapat akhir kali ini, kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya :

1. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengharapkan dengan adanya evaluasi kinerja di masing – masing OPD dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja OPD sehingga serapan anggaran APBD tidak menvisakan SIIPA yang besar dan hasilnya bisa dimanfaatkan

2. Anggaran yang diberikan untuk BPBD ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi bencana yang ada di Kabupaten Rembang. Mengingat dalam rangka penanggulangan atau pun penanganan bencana ini membutuhkan kinerja yang cepat dan anggaran yang tidak sedikit. Maka kami berharap anggaran yang diberikan ke BPBD ini ditambah, karena ini menyangkut kebutuhan dan keselamatan masyarakat Rembang.
3. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap saudara Bupati melalui dinas terkait untuk lebih mendorong lagi UMKM di Kab. Rembang ini agar lebih berkembang dan lebih maju lagi, Karena jika UMKM ini berkembang dan maju akan meningkatkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang.
4. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap ada verifikasi ulang terhadap masyarakat penerima BPJS APBD karena pada kenyataan yang terjadi di masyarakat banyak yang seharusnya menerima tapi tidak terakomodasi, sedangkan banyak masyarakat yang seharusnya tidak wajib menerima justru mendapatkan BPJS APBD tersebut. Untuk BPJS mandiri terkait tarif rawat inap, plafon yang diberikan tidak signifikan membuat resah keluarga pasien apabila naik kelas.
5. Dalam pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap dinas terkait bisa memverifikasi secara detail masyarakat yang benar – benar layak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga nantinya tidak salah sasaran bagi penerima bantuan RTLH ini.
6. Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengharankan khususnya Dinas

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem semoga apa yang kami sampaikan di forum yang terhormat ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan ide – ide bagi Kabupaten Rembang untuk kesejahteraan masyarakat Rembang pada umumnya.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

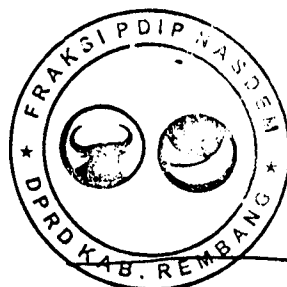
Dengan segala pertimbangan kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem di akhir penyampaian pendapat akhir ini. dengan mengucap “ **Bismillahirrohmanirrohim**” kami menyatakan dengan ini “ **Menyetujui** “ RAPERDA tentang Perubahan APBD T.A 2017 ini untuk disahkan menjadi PERDA APBD Perubahan T.A 2017.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wa Ridho Whal Inayah Wassalamu’ alaikum wr. Wb.

M E R D E K A !!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. REMBANG

KETUA
JASMANI



SEKRETARIS
ALIRCHAM ST

TAN
M. INANG

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN (APBD-P) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH PERUBAHAN
(APBD-P) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Disampaikan oleh puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 29 September 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Setelah melalui berbagai tahapan dalam pembahasan Rancangan APBD-P Kabupaten Rembang Tahun 2017, dalam Rapat Komisi-Komisi, Rapat Banggar, dan Rapat Fraksi, Kami sampaikan catatan penting sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pembahasan bersama masih ada persoalan yang belum bisa diselesaikan bersama karena keterbatasan anggaran. Hal ini terbukti denga

semestinya disiapkan T-1, karena dengan adanya dokumen perencanaan pekerjaan T-1 ini akan mempermudah pembahsan dan pelaksanaan pekerjaan pada tahun yang akan datang, sehingga pekerjaan bisa segera dilaksanakan di awal tahun tanpa harus menunggu pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana terlebih dahulu dan ini berdampak pada waktu yang cukup panjang pekerjaan fisiknya dan tentu saja akan berdampak pada kualitas serta kuantitas pekerjaan tersebut. Kedepan kami meminta agar dianggarkan perencanaan kegiatan fisik T-1.

- Fraksi Gerindra meminta kepada saudara bupati agar anggaran di Pekerjaan Fisik yang ada di Dinas Teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak disertai Anggaran BIUM, Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas yang menempel menjadi Satu, karena akan membelenggu pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut karena dengan adanya biaya jasa konsultan perencana dan pengawas maka harus sesuai dengan Permen PU Nomor 31 tahun 2015 seperti yang ada di tahun 2017 ini. Padahal Dinas teknis bisa melaksanakan Pekerjaan Perencanaan sendiri serta melakukan Pengawasan sendiri. Kedepan mohon anggaran BIUM disendirikan, kecuali untuk pekerjaan yang anggaranya cukup besar dan ketersediaan Pegawai yang terbatas.
- Kami juga mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bahwa sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 112 ayat 1, disebutkan bahwa Pemerintah , Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, melalui Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan upaya percepatan Pembangunan Desa dalam bentuk bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis. Sejalan dengan amanat UU Desa tersebut, kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi telah melaksasnakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) melalui kegiatan pendampingan oleh Tenaga Pendamping ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Monitoring dan Evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan Pembangunan Desa bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah hukum, karena kita tahu sampai saat ini setelah adanya dana desa sudah ada lebih 200 kepala Desa se Indonesia yang masuk penjara karena Permasalahan Dana Desa tersebut.

- Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melihat Ketersediaan Jumlah pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang saat ini sangat minim tenaga Teknisnya, karena hal ini akan menghambat pekerjaan di lapangan. Meskipun saat ini di Dinas tersebut sudah ada 65 Pegawai, tetapi yang 28 orang adalah Pegawai lapangan yang mengurus taman dan makam serta 6 orang adalah pegawai Honorer dan 12 orang tenaga kebersihan. Jumlah ini sangatlah kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan seharusnya yaitu sebanyak 113 orang.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan ***Bismillahirrohmanirrohim***, kami menerima Raperda tentang APBD-Perubahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda. Atas segala kekurangan kami sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. *Amiin...Amiin ya Robbal Alamin*

Billahitaufiq wal hidaayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 29 September 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


H. CHASABUDDIN


GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap
PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TA. 2017

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Rembang

Hari Jum'at, 29 September 2017

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Yang kami hormati

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Saudara Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di kalangan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Para hadirin yang kami muliakan.

Segala puji bagi Allah yang melimpahkan taufik rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi masyarakat dan abdi negara.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi DPRD bersama OPD (organisasi perangkat daerah) terkait dan dilanjutkan pembahasan antara TAPD bersama Banggar DPRD maka saatnya kami menyampaikan pendapat Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pembahasan RAPBD Perubahan Kabupaten Rembang TA 2017 sbb.

- Dalam Perda No. 2 Th. 2014 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai janji Pemkab Rembang bahwa pada tahun 2018 mendatang Kabupaten Rembang mendapatkan opini WTP (wajar tanpa perkecualian). Sehubungan ini Fraksi Karya Sejahtera minta kepada Saudara Bupati mempersiapkan dengan baik agar pada tahun 2018

- Banyak program Pemkab Rembang yang tertuang dalam RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) namun belum bisa dilaksanakan sampai dengan APBD Perubahan 2017 ini karena keterbatasan keuangan daerah, padahal banyak potensi pendapatan daerah yang belum dioptimalkan. Misalnya pajak daerah golongan C masih banyak yang lolos dari pungutan dan retribusi TPI yang tidak sesuai dengan Perda No. 8 Th 2014 yakni menjual ikan hasil tangkapan diluar TPI. Karena itu harapan kami Saudara Bupati agar memerintahkan OPD (organisasi perangkat daerah) dan SATPOL PP untuk mengambil tindakan tegas kepada para wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- Berkenaan dengan pengisian formasi perangkat desa yang lowong saat ini, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten mengawal proses ini agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harapan tidak ada masalah dikemudian hari.
- Pada pembangunan tahun 2017 yang sedang berjalan ini kami merasakan kurang optimal pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen OPD (organisasi perangkat daerah) dalam melaksanakan pembangunan tidak sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kami berharap setelah ditetapkan APBD-P Kabupaten Rembang TA 2017 ini, pelaksanaan pembangunan oleh OPD (organisasi perangkat daerah) berjalan lebih cepat sehingga pelayanan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi dengan menyerap belanja publik semaksimal mungkin dan meninggalkan SILPA (siswa lebih anggaran pembangunan) seminimal mungkin.

Demikianlah pendapat kami terhadap pembahasan

rekomendasi agar dilaksanakan sebaik-baiknya mengingat sisa waktu yang tinggal 3 bulan efektif.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menutup pendapat fraksi ini kami mengutip piweling dari Sunan Drajad seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial, sbb:
"Menehana teken marang wong kang wuta, menehana pangan marang wong kang luwe, menehana sandhangan marang wong kang wuda lan menehana ngeyub marang wong kang kodanan".

Artinya: Kita sebagai pemimpin semestinya memberi bimbingan dan petunjuk kepada siapapun yang belum tahu agar bisa dijadikan pedoman hidup, mensejahterakan kehidupan rakyat yang miskin, mengajarkan budi pekerti atau etika kepada sesama dan memberi perlindungan kepada orang yang menderita.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian pendapat Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. SMARI, SH



Sekretaris,

JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Dibacakan Oleh : SUKARMA'IN

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang
dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2017 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

1. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran perubahan ini cukup besar, untuk itu kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk bekerja lebih optimal sehingga target PAD dapat terwujud.
2. Mengingat Tahun Anggaran hanya tersisa 3 (tiga) bulan, kami mengharapkan segenap perangkat daerah untuk dapat tertib waktu, baik dalam penyusunan dokumen, penatausahaan ataupun pelaksanaan kegiatan.
3. Penyerapan anggaran menjadi isu strategis di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Rembang. Tetapi kami meyakini bahwa kita tidak akan berhenti kepada penyerapan anggaran saja, namun juga kualitas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. Kuantitas dan kualitas adalah dua sisi mata uang yang harus selalu kita jaga keseimbangannya, agar dapat mencapai Visi Misi yang telah dicita-citakan bersama.
4. Kami mengajak setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, menjaga dan mengawal program-program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan dan kami mensepakati Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Semoga pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2017 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 29 September 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua


SUKARMAIN

Sekretaris

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Rembang, 29 September 2017**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;
- Ykh. - Wakil Bupati Rembang ;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Kepala OPD se-Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

P. 1.554. NAK 209.
P. 1.763 NAK 13.45
B. 1-7638 NAK 13.29
B. 1.969 - 205.11
ditutup pembicara 2017

Sam Kelom
Ridha Gusni
TPI

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka ***Persetujuan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017***, dalam keadaan sehat wal'fiat.

Kami sampaikan “**terima kasih**” kepada semua pihak, terutama jajaran legislatif yang telah mendukung dan mencurahkan perhatian dengan semangat yang tinggi membahas hingga selesainya proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sehingga berjalan lancar dan tepat waktu.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pembahasan Raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan bertujuan untuk mengantisipasi perubahan

program dan kegiatan baru daerah yang tentunya mempengaruhi belanja daerah, selain hal tersebut guna mempercepat program-program pembangunan yang mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menikmati program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 ini, pada setiap program yang akan dilaksanakan nantinya dapat memberikan *output* dan *outcome* dengan kuantitas dan kualitas yang terencana dan terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Dengan demikian melalui Perubahan APBD tahun anggaran 2017 ini diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung aspirasi berbagai program dan kegiatan yang berkembang di masyarakat. Sehingga dengan perubahan

anggaran ini diharapkan dapat menyempurnakan program atau kegiatan yang sudah berjalan maupun yang belum teranggarkan pada APBD tahun anggaran 2017, baik kegiatan yang bersifat keharusan dan instruksional, serta dapat mempercepat pencapaian tahapan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, serta besaran Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman dan rujukan kebijakan kita pada tahun 2017 dalam melaksanakan aktivitas pemerintah dan

pembangunan Kabupaten Rembang diberbagai sektor. Untuk itu, saya tetap optimis bahwa kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dapat kita manfaatkan secara efektif untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Adapun Rancangan Anggaran Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.763.604.831.109,60 (*Satu trilyun tujuh ratus enam puluh tiga milyar enam ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Seratus Sembilan rupiah enam puluh sen*), mengalami peningkatan sebesar 13,45 % dari APBD Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.1.554.462.883.886,- (*Satu trilyun lima ratus lima puluh empat milyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), maka terdapat kenaikan sebesar Rp.209.141.947.243,60 (*Dua ratus sembilan milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu*

dua ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sen)

Selanjutnya untuk Rancangan Anggaran Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.969.034.898.819,18 (*Satu trilyun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah delapan belas sen*) mengalami peningkatan sebesar 13,29 %, dibanding anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.738.067.268.368,- (*Satu trilyun tujuh ratus tiga puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*), maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 230.967.630.451,18 (*Dua ratus tiga puluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah delapan belas sen*).

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat defisit sebesar Rp. 205.430.067.709,58 (*Dua ratus lima milyar empat ratus tiga puluh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah lima puluh delapan sen*),

yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp. 205.430.067.709,58 (Dua ratus lima milyar empat ratus tiga puluh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah lima puluh delapan sen), sehingga pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Melalui rapat Paripurna ini pula, sekali lagi saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan terima kasih kepada saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh Pimpinan OPD beserta staf yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda Perubahan OPD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini.

Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas Komisi DPRD semoga dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah daerah, utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. *Aamiin, Aamiin, Ya Robbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, SPd. I. *R.*



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / / 2017

NOMOR : 900 / 19 / 2017

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pada Hari ini *jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **H. MAJID KAMIL MZ** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. **H. GUNASIH,S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan

2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

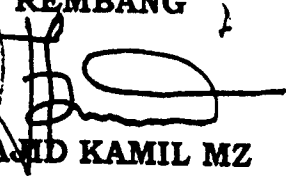
Rembang, 29 September 2017

BUPATI REMBANG

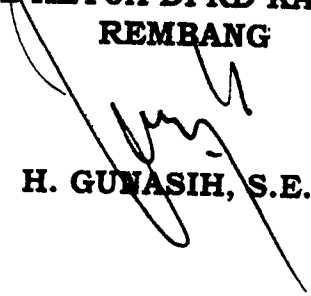

H. ABDUL HAFIDZ



**KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


H. MA'ID KAMIL MZ

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


H. GUNASIH, S.E.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;

35. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah / Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah ;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Daerah ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ;
47. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 29 September 2017 ; .

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 September 2017 ;

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 September 2017 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam Laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah .

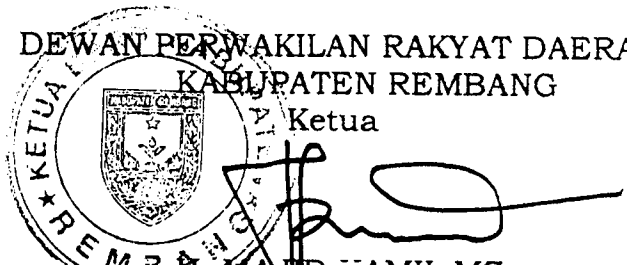
KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua

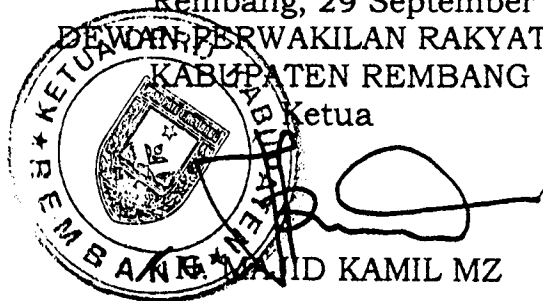


REKOMENDASI

Guna untuk menegakkan Perda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, kami berharap Bupati menugaskan Satpol PP untuk menangani masalah tersebut dikarenakan masih ada transaksi jual beli diluar Tempat Pelelangan Ikan , sehingga tidak ada pemasukan retribusi atas transaksi tersebut .

Rembang, 29 September 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua



ABDUL KAMIL MZ

